

TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAITINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang)



Oleh: NINA HADIYANTI (06400097)

law

Dibuat: 2010-10-21 , dengan 6 file(s).

Keywords: Perlindungan Anak, Putusan Hakim, konsekuensi yuridis

ABSTRAKSI

Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) Dijelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sangat jelas dalam undang-undang tersebut memeberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat korban pencabulan. Namun pada kenyataannya hakim jarang menggunakan pasal ini untuk menjerat para pelaku kejahatan pencabulan. Seperti pada putusan Pengadilan negeri malang No Perkara 341/Pid.B/2009/PN.Mlg yang dalam amar putusannya hakim tidak menggunakan pasal ini melainkan pasal 293 KUHP padahal korban pencabulan tergolong anak dibawah umur dan pelaku pencabulan adalah seorang polisi yang aktif dan kejadian pencabulan ini ketika polisi tersebut melakukan tugasnya sebagai polisi. Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana hanya delapan bulan terhadap terdakwa padahal terdakwa adalah seorang polisi yang seharusnya melindungi masyarakat namun hal ini rupanya tidak menjadi alasan yang kuat untuk hakim menjatuhkan pidana yang berat. Hal ini yang membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti putusan hakim tersebut dengan ruang sidang yang tertutup untuk masyarakat kemungkinan fakta-fakta yang dimunculkan dalam persidangan bisa direkayasa apalagi korban masih tergolong kelurga ekonomi lemah yang sangat syarat dizalimi oleh hukum. Dari pembahasan, dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan Pokoknya adalah terdakwa tidak diberat dengan pasal 82 Undang-Undang perlindungan anak yang mana bila dilihat dari kasusnya seharusnya hakim lebih peka agar bisa memberikan pelajaran atau efek jera terhadap para pelaku pencabulan lainnya serta konsekuensi yuridisnya terhadap putusan hakim ini yang tidak memuat undang-undang perlindungan anak dan aspek keadilan bagi korban dan keluarganya.

Menurut hemat penulis, seharusnya hakim lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena dari putusannya hidup seseorang itu diketahui. Didalam putusan ini hakim memuat faktor Psikologi setidaknya melihat korban seorang anak perempuan yang masih dibawah umur dan masa depan anak tersebut dan aspek keadilan bagi korban pencabulan bukan karena anak tersebut juga melakukan kesalahan namun tidak ada keadilan bagi.

ABSTRACT

Within the law no 23 year 2002 about Children Protection article 92 subsection (1) was explained that every person who had done violence or violence threat, force, gimmick, several lies or persuade a child to do or to let one child do pornographic act purposively, will be sanctioned with imprisonment for longest period 15 (fifteen) years and shortest for 3 (three) year and fine for maximum Rp 300.000.000,00 (three hundred million rupiah) and least is Rp 60.000.000,00 (sixty million rupiah). It is very clear within the law which gives protection for under-age children as pornographic victim. However in the reality judges have rarely used this article to capture pornographic criminal. Such as within the decision of pengadilan negeri malang (State Court) for case No 341/Pid.B/2009/PN.Malang in which within its decision judges didn't use this article and use article 293 KUHP whereas pornographic victim belong to under-age children and pornographic performer is an active police officer and the incidence occur when the police has done his job as a police officer. The judges only gives criminal punishment for eight month toward the defendant though defendant is a police officer that supposes to protect the society but this has supposedly not become a great excuse for the judges to give heavier punishment. This has drawn interest of the author to examine the adjudication of close court for public in which facts that appear during court might have been manipulated. Moreover the victim is belonging to low economy family that is vulnerable to become victim of the law.

From the discussion, we might find out that what becomes main issues is defendant was not sanctioned using article 82 from law about children protection in which to be viewed from the case, judge suppose to be more sensitive in order to give lesson or cure from a bad habit toward other pornographic actor and its juridical consequence of this adjudication who didn't include law of children protection and justice aspect for the victim and the family.

According to the author, judges should be wiser in taking decision because from his decision one's life might be concluded. In this adjudication, judges have included psychology factor for at least by seeing victim as an underage girl and future of that girl also justice aspect for pornographic victim not only because the girl was also making mistake but there are no justice for her.

Keywords: Children Protection, Adjudication, Juridical consequence